

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Astuti, Made Sadhi. (2003). *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*. Malang: Penerbit UM Press.
- Bunadi Hidayat. (2010). *Pemidanaan anak di bawah umur (Cet. 1.)*. Bandung: Alumni.
- Faisal, Salam. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Buku Saku untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Hidayat, Bunadi. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marpaung, Laden. (2005). *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. (2017). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Napitupulu, E. A. T., Suwahju, A. (2015). *Pemidanaan anak dalam rancangan KUHP*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Nasution, Bahder Johan (2018). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso, Abintoro. (2012). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Nusa Media.
- Purba, Jonlar. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Permata Aksara.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin (2004). *System sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system & implementasinya*. Jakarta: Rajawali press.
- Sinaga, Dahlan. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Sinaga, Dahlan. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soetodjo, Wagiaty. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Solehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*. Persada: Raja Grafindo

- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Supeno, Hadi, (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ahmad, G. (2018). Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Istighna*, 1(1), 42–59.
- Ahmad, O. :, & Rahawarin, R. (2017). Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional). *Legal Pluralism*, 7(2).
- Anggraeny, K. D. (2013). Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikitropika. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2).
- Anugrah, R. (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Danujaya, I. D. P. G. A. (2018). Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Desiandri, Y. S., Madiasa, Marlina, & Ikhsan, E. (2017). Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan). *Usu Law Journal*, 5(1).
- Hasan, H. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Herista, A. D. P., & Barlian, A. E. A. (2020). Rechterlijk Pardon Dalam Kebijakan Dan Penerapan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Herista, A. D. P., & Barlian, A. E. A. (2020). Rechterlijk Pardon Dalam Kebijakan Dan Penerapan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).

- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1).
- Iswantoro, W. (2013). Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Hukum Pidana Anak Indonesia Dan Belanda. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/Selat.V6i2.1019>
- Maulidah, K., Serikat, N., & Jaya, P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, 1(3).
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 129.
- Rasdianah. (2017). Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman. *Jurisprudentie*, 4(2).
- Reksoputri, C. R. (2021). Problematika Penuntutan Kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum Berupa Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. *Banua Law Review*, 33(2), 214–223. <http://balrev.uim.ac.id/index.php/balrev>
- Remaja, I. N. G. (2019). Rancangan Kuhp Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritis. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 7(2), 1–4.
- Rukmana, R., & Nursiti. (2018). Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 117.
- Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Siagian, P., Syahrin, A., Mulyadi Mahmud, & Marlina. (2015). Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan. *Usu Law Journal*, 3(2).
- Suryani, B., Hamdan, F. M., Ablisar, M., & Leviza, J. (2013). Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/Pn.Gs). Dalam *Usu Law Journal: Vol. Ii* (Nomor 2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Wetboek Van Straftrecht ;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan;

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

The Beijing Rules.

Karya Ilmiah

Hizami, M. F. (2020). Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Dalam RKUHP Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Unsur Dalam Tindak Pidana Aborsi. *Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*.

Rambe, M. S. (2021). Pidanaan Pencabulan Anak dibawah Umur (Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Deniardi, M. (2013). *Penerapan Double Track System Dalam Pidanaan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Internet

Safutra, Ilham. 2022. *KUHP Baru dan Dekolonisasi Setengah Hati*. www.JawaPos.com. Diakses pada 27 Mei 2023. <https://www.jawapos.com/opini/01423291/kuhp-baru-dan-dekolonisasi-setengah-hati>.

